

PENDIDIKAN UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Familia Novita Simanjuntak
familia.novita@gmail.com
Universitas Kristen Indonesia

ABSTRACT

Sustainable development urges to merge the three complex dimensions: global economy, global society and physically earth environment. Sachs (2015) states that sustainable development is the expert effort to comprehend the world and the method to solve the crowded earth issues by the global population growth that nine times increase than the first industry era. Education is one of fatal element for sustainable development phase especially for the human (society) development. Human development becomes the main core of invesment for economy development because it is prepared for the youngst as the next generation to develop economic improvement individually for their family and also for their community (include for the State's development interest). Marshall, Hine and East (2017) studied about the education which develop the autonomous motivation to support individu execute the pro-environmental behaviors (PEBs). This autonomous motivation will establish the environmental attitude and personality in decision making and action of sustainable environment protection and preservation.

Keywords: *sustainable development, education, pro-environmental behaviors*

ABSTRAK

Pembangunan berkelanjutan berupaya untuk mengkaitkan tiga sistem yang rumit yaitu sistem ekonomi dunia, sistem sosial dunia dan lingkungan fisik bumi. Sachs (2015) menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan menjadi cara para pakar untuk memahami dunia dan sebuah metode untuk menyelesaikan permasalahan dunia yang berawal dari sesaknya bumi akibat pertumbuhan penduduk dunia yang sudah mencapai sembilan kali lebih banyak dari populasi manusia yang hidup pada jaman dimulainya revolusi industri. Pendidikan adalah salah satu komponen yang penting dalam proses pembangunan berkelanjutan terutama pembangunan yang terkait manusia (sosial). Pembangunan manusia menjadi bagian vital dari investasi yang dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi karena merupakan jalur investasi yang disiapkan untuk anak-anak sebagai generasi penerus yang akan melanjutkan perbaikan ekonomi baik secara individu bagi keluarganya maupun secara berkelompok bagi komunitasnya (termasuk kepentingan pembangunan di Negeranya). Penelitian Marshall, Hine and East (2017) menyatakan

bahwa pendidikan dapat membentuk dorongan dari dalam setiap individu untuk melakukan perilaku pro lingkungan hidup (pro-environmental behaviours). Dorongan dari dalam individu ini secara otonomi membentuk watak dan karakter yang ramah lingkungan untuk membuat keputusan dan bertindak yang melindungi dan menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.

Kata kunci: pembangunan berkelanjutan, pendidikan, pro-environmental behaviors

PENDAHULUAN

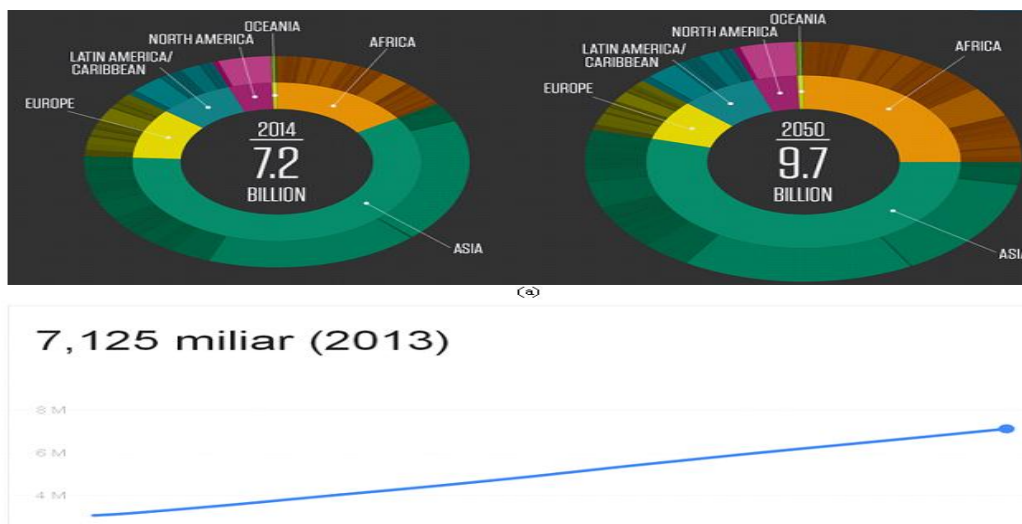
Pada tahun 1978, seorang ilmuwan bernama Thomas Robert Malthus menyadari bahwa pertumbuhan penduduk akan melampaui kemampuan (carrying capacity) lingkungan alam untuk menyokong keberlangsungan hidup manusia sehingga dia menghasilkan sebuah Teori Keterbatasan Menuju Pertumbuhan (Limit to Growth) yaitu keadaan pertumbuhan ekonomi yang akan sangat dibatasi oleh ketersediaan sumber daya alam (Lomborg, 2002). Pemikiran Malthus ini mulanya mendapat kritikan namun menjadi permulaan bagi dunia untuk mulai memperhatikan aspek keberlanjutan yang diprakarsai oleh World Commission on Environment and

Development (Komisi Dunia pada Lingkungan Hidup dan Pembangunan) dengan menerbitkan sebuah buku tentang Masa Depan Kita Bersama (Our Common Future) yang menceritakan konsep pembangunan ekonomi yang berkaitan dengan lingkungan hidup dalam konteks pembangunan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan-kebutuhan generasi yang akan datang.

Sachs (2015) menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan menjadi cara untuk memahami dunia dan sebuah metode untuk menyelesaikan permasalahan dunia. Titik awalnya berasal dari sesaknya bumi akibat

pertumbuhan penduduk dunia yang sudah mencapai 9x lebih banyak dari populasi manusia yang hidup pada jaman dimulainya revolusi industri. Jumlah penduduk di dunia pada tahun 2013 mencapai 7,125 milyar jiwa dan cenderung meningkat sejak tahun 1960 dengan harapan hidup manusia

yang juga meningkat menjadi 71 tahun (dari 53 tahun). Pertumbuhan penduduk dunia akan terus meningkat hingga mencapai 9,7 milyar pada tahun 2050. Tren dan sebaran penduduk dunia dapat dilihat pada Gambar 1. (Population Reference Bureau, 2014).



Gambar 1. Tren dan Sebaran Penduduk Di Dunia

- (a) Sebaran penduduk di dunia
 - (b) Tren peningkatan jumlah penduduk dari tahun 1960 sampai dengan tahun 2013
- Sumber: Population Reference Bureau, 2014

Milyaran manusia terus mencari pijakan mereka di dunia ekonomi. Mereka yang miskin berjuang mendapatkan makanan, air yang aman, pelayanan kesehatan, dan tempat berlindung semata hanya untuk bertahan hidup. Kaum miskin pun terus berupaya meningkatkan kesejahteraan dan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak mereka. Sementara di sisi yang lain, mereka yang tinggal di dunia yang kaya selalu mengharapkan kecanggihan teknologi akan menawarkan mereka dan keluarga mereka untuk naik ke level kesejahteraan yang lebih tinggi. Tampaknya mereka yang punya pendapatan tinggi juga berdesakan untuk bisa memasuki dunia yang isinya orang-orang terkaya. Alhasil, manusia yang berjumlah 7,125 milyar secara bersamaan terus mengupayakan peningkatan ekonomi mereka.

Upaya manusia dalam meningkatkan kesejahteraannya membuat dunia ekonomi semakin mempercepat keterhubungan

antara perdagangan, pembiayaan, teknologi, aliran produksi, perpindahan penduduk, dan jejaring sosial. Percepatan tersebut menghasilkan GWP (Gross World Product) mencapai 90 triliun USD per tahun, yang belum pernah terjadi sebelumnya sehingga tidak pembeda dari GWP di tahun-tahun sebelumnya. Artinya, percepatan yang dilakukan oleh dunia ekonomi saat ini yang meliputi barang dan jasa tidak pernah terjadi dalam 250 tahun silam.

Namun, di dalam percepatan ekonomi tersebut terjadi ketimpangan yang tinggi dalam distribusi pendapatan baik di dalam Negara maupun antar Negara, sehingga secara bersamaan, dunia ekonomi menjadi dunia yang mewah sekaligus menjadi dunia yang kumuh, yaitu keadaan dimana si kaya menikmati umur panjang dan kesehatan yang baik (yang jauh lebih baik dari kesejahteraan di masa lampau), di sisi lain, si miskin (jumlahnya sekitar 1 milyar

jiwa) hidup dalam kekumuhan dan terus berjuang untuk bertahan hidup setiap hari (tantangan hidup dan mati akibat kekurangan gizi, kurangnya pelayanan kesehatan, tempat berlindung yang tidak aman, dan kurangnya air minum yang aman dan sanitasi).

Percepatan dunia ekonomi tidak saja menciptakan ketimpangan yang besar tetapi juga mengancam bumi itu sendiri. Manusia tergantung pada alam untuk makanan dan air, barang-barang untuk bertahan hidup dan keamanan dari bencana alam dan wabah penyakit, atau dengan kata lain, layanan lingkungan hidup (*environmental services*). Namun, sebagai makhluk hidup yang sangat tergantung pada layanan lingkungan hidup, manusia sangat kurang dalam upaya perlindungan kebutuhan fisik yang dibutuhkan untuk bertahan hidup tersebut, sehingga kegiatan ekonomi manusia secara berangsur menciptakan krisis lingkungan

hidup raksasa yang mengancam kehidupan dan keberlanjutan milyaran manusia dan ketahanan hidup jutaan spesies lain yang hidup di planet yang sama dengan manusia.

Ancaman lingkungan hidup terus meningkat di masa-masa mendatang. Kegiatan manusia mengubah iklim bumi, ketersediaan air bersih, kandungan kimia lautan, dan habitat spesies lain. Perubahan tersebut berdampak pada perubahan proses siklus air, siklus nitrogen dan siklus karbon yang menjadi kunci fungsi kehidupan, yang belum dapat diketahui kadar dampak, waktu dan akibatnya, namun, disadari bahwa dampak ini sangat berbahaya. Akhirnya, dunia pun membutuhkan sebuah proses pembangunan berkelanjutan yang berupaya untuk mengkaitkan tiga sistem yang rumit yaitu sistem ekonomi dunia, sistem sosial dunia dan lingkungan fisik bumi (Konferensi

PBB di Rio de Janeiro tahun 2012).

Begitu banyak pertanyaan yang akan menjadi tantangan pembangunan di masa depan. Bagaimana perubahan ekonomi pada 7,125 milyar manusia dengan GWP 90 triliun USD dari waktu ke waktu? Apa saja yang membuat ekonomi bertumbuh? Kenapa kemiskinan terjadi? Apa yang terjadi ketika milyaran manusia secara bersamaan terhubung melalui pasar, teknologi, pembiayaan dan jejaring sosial? Bagaimana kehidupan sosial dunia menanggapi ketimpangan pendapatan, kesejahteraan, dan peran kekuasaan? Dapatkah si miskin keluar dari keadaannya? Dapatkah kepercayaan dan simpati manusia mengatasi pembagian kelas dan kekuasaan? Dan apa yang akan terjadi ketika ekonomi dunia berbenturan dengan lingkungan hidup fisik? Apakah ada sebuah cara yang menggabungkan

pembangunan ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan hidup?

Pembangunan berkelanjutan adalah impian pembangunan bagi semua Negara di dunia. Capaian pembangunan berkelanjutan yang disusun oleh PBB meliputi 17 indikator menurut UN-SDGs (2015) yaitu:

- (1) ketiadaan kemiskinan (no poverty);
- (2) ketiadaan kelaparan (no hunger);
- (3) kesehatan yang baik (good health);
- (4) pendidikan yang berkualitas (quality education);
- (5) kesetaraan gender (gender equality);
- (6) air bersih dan sanitasi (clean water and sanitation);
- (7) energi terbarukan (renewable energy);
- (8) pekerjaan yang baik dan ekonomi yang bertumbuh (good jobs and economic growth);

(9) inovasi dan infrastruktur (innovation and infrastructure);

(10) kesenjangan berkurang (reduce inequalities);

(11) kota dan masyarakat yang berkelanjutan (sustainable cities & communities);

(12) konsumsi yang bertanggung jawab (responsible consumption);

(13) aksi terhadap perubahan iklim (climate action);

(14) kehidupan di bawah air (life below water);

(15) kehidupan di atas tanah (life on land);

(16) kedamaian dan keadilan (peace and justice);

(17) kemitraan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (partnerships for the goals).

Pendidikan dan Perannya dalam Pembangunan Berkelanjutan

Pendidikan adalah salah satu komponen yang penting dalam proses pembangunan berkelanjutan terutama pembangunan yang terkait manusia (sosial). Pembangunan manusia menjadi bagian vital dari investasi yang dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi. Selain pendidikan, pembangunan manusia sebagai investasi meliputi pelayanan kesehatan, pemenuhan gizi, dan asupan kesehatan lain yang membuat hidup menjadi lebih produktif. Pembangunan manusia sebagai investasi dianggap sebagai modal manusia yang setara dengan modal fisik investasi yaitu jalan-jalan dan jembatan-jembatan (infrastruktur). Modal manusia bagi investasi dianggap sebagai indikator penting bagi kemampuan individu atau keseluruhan individu sebagai kelompok memberikan sumbangsih fungsinya secara maksimum bagi pembangunan ekonomi melalui pendidikan yang mapan (berlanjut), keterampilan kerja, perbaikan kesehatan, dan

komponen lainnya yang sejenis (Mahat & Idrus, 2016).

Penelitian Marshall, Hine and East (2017) menyatakan bahwa pendidikan dapat membentuk dorongan dari dalam setiap individu untuk melakukan perilaku pro lingkungan hidup (pro-environmental behaviours). Dorongan dari dalam individu ini secara otonomi membentuk watak dan karakter yang ramah lingkungan untuk membuat keputusan dan bertindak yang melindungi dan menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.

Pendidikan merupakan jalur investasi yang disiapkan untuk anak-anak sebagai generasi penerus yang akan melanjutkan perbaikan ekonomi baik secara individu bagi keluarganya maupun secara berkelompok bagi komunitasnya (termasuk bagi kepentingan pembangunan di Negeranya), sehingga pendidikan menjadi pondasi bagi keberhasilan pembangunan industri dan peningkatan ekonomi. Pendidikan sebagai

jalur investasi juga akan menciptakan manusia yang mampu membuat siklus hidupnya secara individu (Lemos & Agrawal, 2006). Siklus hidup ini menggambarkan bagaimana manusia secara individu membuat pilihan-pilihan terbaik mulai dari tahapan dini sebuah siklus hidup untuk menciptakan kecakapan, kesehatan dan produktifitas di semua tahapan kehidupan.

Setiap tahapan dalam siklus hidup menentukan keadaan dalam tahapan berikutnya, bahkan kesehatan orang tua sebelum pembentukan janin pun menjadi penting. Kesehatan yang buruk dan gizi buruk dapat diwariskan dari generasi ke generasi melalui pengaruh genetik (epigenetik), sehingga masa kehamilan ibu yang aman, kelahiran bayi yang sehat, kesehatan yang baik pada balita, gizi baik dan bebas cacingan menjadi sangat penting bagi anak-anak dalam rangka pertahanan hidup secara individu

dari tantangan kesehatan di masa kanak-kanaknya sekaligus bagi produktifitas dan kesejahteraan hidupnya secara individu ketika dia dewasa (Dahl, 2004).

Pembentukan kognitif pada anak terjadi di usia dini. Pembentukan otak pada janin tergantung pada lingkungan yang penuh kasih dan rendah stress, terikat pada pola asuh, dan pembendaharaan banyak kata yang diucapkan oleh si pengasuh. Proses pendidikan formal seharusnya dimulai sebelum pendidikan dasar (Sachs, 2015). Kini, semakin banyak Negara yang menyelenggarakan pendidikan usia dini untuk mendukung pembelajaran di usia dini dan pembentukan otak yang sehat. Dari situ, pendidikan dasar sekarang menjadi kebutuhan dasar dan hak dasar bagi anak-anak dan tercantum dalam Tujuan Pembangunan Milenium 2 (MDG 2).

Namun, pendidikan dasar sudah tidak cukup lagi bagi ekonomi dunia abad 21, oleh karena itu, perlu dibangun pendidikan level kedua yang mencakup pelatihan vokasi (keterampilan) atau pendidikan level ketiga. Inilah penyebab alami orang muda jaman sekarang rata-rata lebih melek teknologi, terampil dan terlatih jika dibandingkan dengan orang tua jaman sebelumnya.

Kebutuhan pendidikan lanjutan untuk maksimasi pembangunan manusia sebagai investasi bagi pembangunan ekonomi menimbulkan kesenjangan antara kaum kaya dengan kaum miskin, bahkan secara global kesenjangan dalam pendidikan terjadi antara Negara kaya dengan Negara miskin (Sephard, 2008). Kesenjangan dalam pendidikan terjadi ketika kaum kaya mampu menyediakan pendidikan lanjutan terbaik kepada anak-anaknya, sedangkan kaum miskin terus berjuang mengupayakan

pendidikan lanjutan kepada anak-anaknya, di samping perjuangan pemenuhan kebutuhan lain untuk bertahan hidup (makanan, kesehatan, air bersih). Begitu juga ketimpangan pendidikan yang terjadi secara global, dimana Negara kaya mampu menyediakan pendidikan lanjutan yang memadai bagi masyarakatnya sedangkan Negara miskin masih harus berjuang menyediakan pendidikan lanjutan yang memadai, selain kewajibannya menyediakan makanan, pelayanan kesehatan dan air bersih yang memadai bagi masyarakatnya.

Kemampuan individu mengakses pendidikan secara berkelanjutan menentukan kemampuannya untuk memindahkan posisinya ke level kesejahteraan yang lebih baik. Ketika manusia secara individu mampu mengusahakan kesejahteraannya, maka secara berkelompok, kesejahteraan ini akan mempengaruhi

pembangunan ekonomi negaranya. Negara yang masyarakatnya sejahtera dan produktif akan mengurangi aksesnya terhadap eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan karena lebih mampu menciptakan teknologi tercanggih untuk maksimasi akses pada energi terbarukan daripada menggunakan sumber daya yang tidak terbarukan (Phimphanthavong, 2013).

Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia

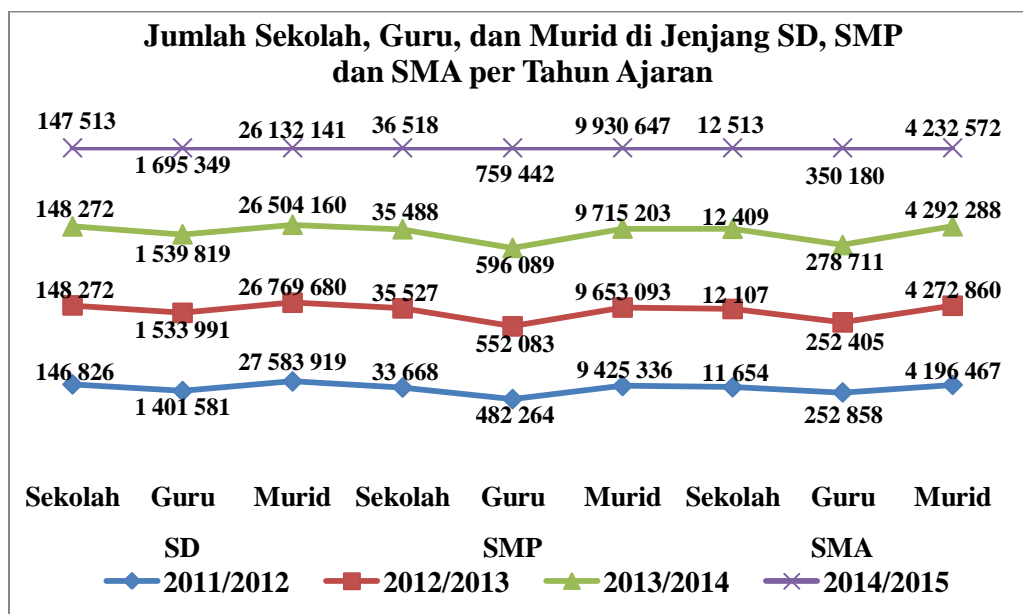
Pemerintah Indonesia mengalokasikan dana APBN tahun 2017 sejumlah Rp 39,82 triliun melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, untuk pelaksanaan PIP (Program Indonesia Pintar), pembangunan USB (Unit Sekolah Baru), ruang kelas baru sebagai program utama dan program dukungan yang mencakup rehabilitasi sekolah dan ruang kelas, pembangunan laboratorium sekolah dan perpustakaan

sekolah, pemberian tunjangan profesi guru non PNS, dan pendampingan 74.000 sekolah dalam pelaksanaan kurikulum 2013 (www.kemdikbud.go.id tanggal 16 Oktober 2016). Namun, bagaimanakah alokasi APBD untuk pendidikan? Apakah pendidikan dianggap sebagai investasi bagi pembangunan ekonomi di daerah di Indonesia? Besaran alokasi APBD menjadi sangat penting untuk menyediakan akses pendidikan seluas-luasnya bagi anak-anak Indonesia, khususnya bagi anak-anak yang tinggal di daerah 3T (terdepan, terluar dan tertinggal).

Alokasi APBD sangat dibutuhkan untuk pembiayaan pendidikan, khususnya bagi anak-anak yang

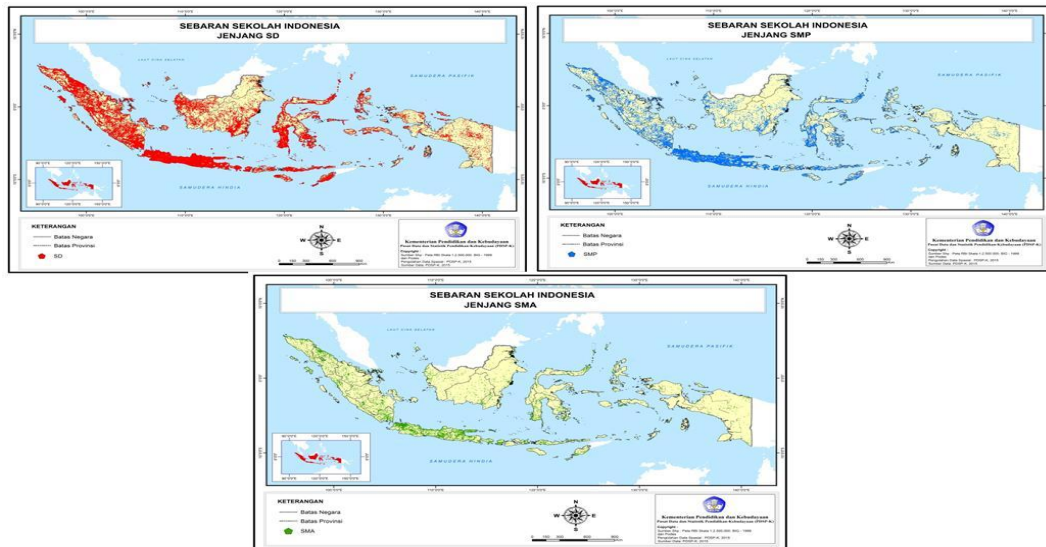
berasal dari keluarga miskin dan tidak mampu secara ekonomi, sehingga anak-anak dari kaum miskin pun mempunyai kesempatan yang sama dengan anak-anak kaum kaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi keluarganya melalui pendidikan yang berkelanjutan. Dengan demikian, APBD dapat menyelesaikan ketimpangan pendidikan di daerahnya masing-masing. Selain alokasi dana APBN dan APBD untuk pendidikan, infrastruktur juga sangat penting untuk keberlanjutan pendidikan di Indonesia, salah satunya adalah dengan menyediakan sekolah-sekolah mulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi sebagai pendidikan level tertinggi.

Kondisi ketersediaan sekolah, guru, dan murid baik untuk jenjang SD, SMP dan SMA di Indonesia dapat kita lihat pada Gambar 2. Data lengkap mengenai jumlah sekolah, guru dan murid di Indonesia disajikan dalam Lampiran 1, Lampiran 2, dan Lampiran 3.



Kondisi pendidikan dasar di Indonesia menurut jumlah sekolah, guru, dan murid selama empat tahun ajaran yang diperlihatkan dalam Gambar 2. dalam keadaan stagnan, bahkan terjadi penurunan jumlah murid dari jenjang SD ke jenjang SMP sampai ke jenjang SMA. Hal ini berarti anak-anak Indonesia ada yang tidak dapat melanjutkan belajarnya sampai dengan jenjang SMP dan SMA di beberapa daerah.

Sebaran sekolah-sekolah di Indonesia jika dilihat dalam peta Indonesia mulai dari tingkat dasar sampai dengan tingkat menengah atas dapat dilihat pada Gambar 3.



Sebaran sekolah jenjang SD, SMP, dan SMA di Indonesia pada Gambar 3. masih terpusat di Indonesia bagian barat, khususnya di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Di sisi lain yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang dilakukan oleh sekolah-sekolah tersebut. Jika kualitas tersebut dapat diukur menggunakan indikator HDI (indeks pembangunan manusia), maka dapat disimpulkan bahwa kualitas pendidikan dan pembelajaran di Indonesia masih buruk karena, menurut laporan UNDP tahun 2013, Indonesia berada pada

peringkat 111 dari 188 negara di dunia. Posisi HDI ini berada jauh dibawah Malaysia, Negara tetangga terdekat, yang berada pada peringkat 64 dan Filipina yang berada pada peringkat 105. Kemudian, bagaimanakah ketersediaan perguruan tinggi di daerah di Indonesia? Bagaimana rasio jumlah perguruan tinggi negeri di daerah terhadap jumlah penduduk?

Sebaran PTN dan rasio jumlah PTN dengan jumlah penduduk di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 1. dan gap antara rasio jumlah PTN dan penduduk dengan jumlah PTN dapat dilihat pada Gambar 3. Tabel 1. memperlihatkan bahwa

rasio jumlah PTN dengan penduduk tertinggi ada di Provinsi Sumatera Utara, lalu di Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat dan Sulawesi Selatan. Apa yang terjadi dengan DKI Jakarta sebagai ibukota Negara Indonesia? Mengapa rasionya sangat kecil jika dibandingkan dengan 3 provinsi lain di Pulau Jawa? Pertanyaan ini dapat dijawab bahwa DKI Jakarta sebagai ibukota Negara membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi pihak swasta untuk membangun perguruan tinggi dalam rangka penyediaan pendidikan level teratas bagi generasi muda Jakarta dan yang berasal dari daerah di Indonesia.

Pilihan pendidikan yang relatif lebih banyak tersedia di Provinsi DKI Jakarta semakin mendorong perpindahan

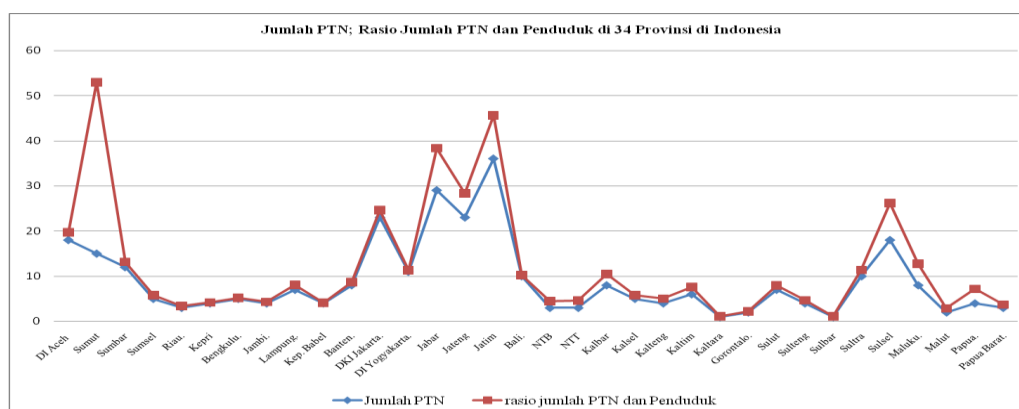
penduduk khususnya yang berusia produktif dari daerah menuju ibukota, sehingga perpindahan ini menimbulkan dampak lain terhadap kualitas lingkungan hidup Provinsi DKI Jakarta dan juga mempengaruhi rasio jumlah penduduk produktif di daerah di Indonesia yang berdampak pada percepatan pembangunan dan ekonomi di daerah. Ketimpangan ini semakin jelas terlihat pada Gambar 3. yang memperlihatkan bahwa hampir tidak ada gap antara rasio jumlah PTN dan Penduduk dengan jumlah PTN di Provinsi DKI Jakarta. Keadaannya berbeda dengan Provinsi Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan yang mempunyai gap sangat besar antara rasio jumlah PTN dan Penduduk dengan jumlah PTN. Apakah artinya?

Tabel 1. Daftar Jumlah Penduduk, Jumlah PTN, Rasio Jumlah PTN dan Penduduk di 34 Provinsi di Indonesia

No	Nama Provinsi	Jumlah Penduduk	Jumlah PTN	Rasio Jml PTN & Penduduk
1	DI Aceh	5,1 juta jiwa.	18	1,65
2	Sumut	14,1 juta jiwa.	15	37,97
3	Sumbar	5,2 juta jiwa.	12	1,12
4	Sumsel	8,1 juta jiwa.	5	0,73
5	Riau.	6,4 juta jiwa.	3	0,34
6	Kepri	1,9 juta jiwa.	4	0,14
7	Bengkulu.	1,9 juta jiwa.	5	0,17
8	Jambi.	3,4 juta jiwa.	4	0,24
9	Lampung.	8,2 juta jiwa.	7	1,03
10	Kep. Babel	1,4 juta jiwa.	4	0,1
11	Banten.	11,9 juta jiwa.	8	0,66
12	DKI Jakarta.	10,2 juta jiwa.	23	1,61
13	DIY	3,7 juta jiwa.	11	0,28
14	Jabar	46,8 juta jiwa.	29	9,34
15	Jateng	33,8 juta jiwa.	23	5,35
16	Jatim	38,9 juta jiwa.	36	9,64
17	Bali.	4,2 juta jiwa.	10	0,18
18	NTB	4,8 juta jiwa.	3	1,45
19	NTT	5,1 juta jiwa.	3	1,55
20	Kalbar	4,8 juta jiwa.	8	2,41
21	Kalsel	2,5 juta jiwa.	5	0,78
22	Kalteng	3,9 juta jiwa.	4	0,98
23	Kaltim	4,1 juta jiwa.	6	1,54
24	Kaltara	650 ribu jiwa.	1	0,04

25	Gorontalo.	1,2 juta jiwa.	2	0,13
26	Sulut	2,4 juta jiwa.	7	0,89
27	Sulteng	2,9 juta jiwa.	4	0,61
28	Sulbar	1,3 juta jiwa.	1	0,07
29	Sultra	2,5 juta jiwa.	10	1,32
30	Sulsel	8,6 juta jiwa.	18	8,19
31	Maluku.	1,7 juta jiwa.	8	4,69
32	Malut	1,2 juta jiwa.	2	0,83
33	Papua.	3,2 juta jiwa.	4	3,14
34	Papua Barat.	880 ribu jiwa.	3	0,65
	Total	238,03 juta jiwa	306	

*Sumber data dari beberapa referensi



Gambar 4. Gap antara Rasio Jumlah PTN dan Penduduk dengan Jumlah PTN di 34 Provinsi di Indonesia (sumber dari berbagai referensi)

Gambar 4. memperlihatkan ketimpangan pendidikan terjadi dari segi ketersediaan PTN di 34 provinsi di Indonesia. Ketimpangan ini akan semakin buruk apabila disebabkan oleh perbedaan kapasitas Provinsi DKI

Jakarta sebagai ibukota terlalu besar dibandingkan dengan kapasitas provinsi lain dalam menarik pihak swasta untuk membangun perguruan tinggi karena akan terjadi pemusatan

penduduk produktif hanya di Provinsi DKI Jakarta.

KESIMPULAN

Pendidikan bagi pembangunan berkelanjutan tidak cukup jika tujuannya hanya untuk membangun kognitif anak dan pertumbuhan otak pada balita karena yang dibutuhkan oleh pembangunan manusia dalam pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan karakter manusia yang cinta dan melindungi kelestarian alam dan lingkungan hidup untuk keberlanjutan kehidupannya sebagai individu maupun berkelompok sebagai warga Negara. Oleh sebab itu, pendidikan secara utuh harus mampu memastikan bahwa pembelajaran yang dilakukan dalam pendidikan juga membangun karakter peduli dan lestari pada manusianya yang didukung oleh kemampuan kognitif untuk meningkatkan daya kreatif dan inovatifnya dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Ketimpangan-ketimpangan pendidikan yang terjadi akibat perbedaan kemampuan kaum kaya dengan kaum miskin untuk mengakses pendidikan terbaik bagi anak-anaknya dapat difasilitasi oleh daerah melalui alokasi APBD dalam bantuan biaya sekolah seperti yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dengan Kartu Jakarta Pintar yang secara khusus diberikan kepada anak-anak yang berasal dari keluarga miskin dan tak mampu. Kartu tersebut disediakan tidak dalam bentuk tunai untuk menghindari penyelewengan dana pendidikan oleh orang tua siswa.

Pemerintah Indonesia juga menyediakan Kartu Indonesia Pintar untuk membiayai operasional pendidikan bagi anak-anak terutama yang berasal dari keluarga miskin dan tidak mampu di daerah terdepan, terluar dan tertinggal. Ketersediaan kartu-kartu yang sejenis sangat membantu anak-anak dari kaum miskin mendapatkan kesempatan yang sama untuk pendidikan

dengan kualitas yang baik sehingga masa depannya menjadi lebih baik dengan tingkat kesejahteraan dan ekonomi yang meningkat.

Selain itu, tingkat kesejahteraan guru dan tenaga pendidik khususnya di daerah 3T harus menjadi perhatian dan tanggung jawab pemerintah pusat bersama dengan pemerintah daerah melalui pengalokasian dana untuk honor dan tunjangan terkait kesejahteraan yang dapat mendorong peningkatan kualitas belajar dan mengajar.

Mustahil terjadi peningkatan kualitas pendidikan jika guru dan tenaga pendidik yang terlibat tidak mampu mengakses kesejahteraan yang memposisikan si guru dan tenaga pendidik berada dalam keadaan hidup yang layak.

Di lain pihak, daerah-daerah dengan kewenangan otonominya harus semakin giat berkompetisi menyediakan pendidikan dengan kualitas terbaik bagi pembangunan masyarakatnya untuk mendukung percepatan pembangunan fisik dan ekonomi di daerah sehingga menarik banyak putra-putri daerah untuk kembali membangun di daerahnya masing-masing.

Keberhasilan pendidikan untuk membangun manusia yang dibutuhkan dalam pembangunan berkelanjutan akan semakin nyata terwujud jika tidak terjadi korupsi di semua lini, oleh karena itu, perlu dipastikan terlebih dahulu bahwa semua pihak yang terlibat dalam lembaga terkait pendidikan bebas korupsi dan berintegritas tinggi.

ACUAN PUSTAKA

- Dahl, R. E. (2004). *Adolescent Brain Development: A Period of Vulnerabilities and Opportunities*. Ann. N.Y. Acad. Sci. Volume No. 1021. Pg: 1 – 22.
- DPR Sepakati 39,82 Triliun untuk Anggaran Kemdikbud Tahun 2017. Berita tanggal 19 Oktober 2016 diakses dari laman www.kemdikbud.go.id pada tanggal 10 Mei 2017 pukul 19.00 WIB.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2016). Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Jenjang SD, SMP, dan SMA di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Provinsi Tahun Ajaran 2011/2012 – 2014/2015. Diakses dari www.bps.go.id pada tanggal 20 Mei 2017 pada pukul 10.00 WIB.
- Konferensi PBB tentang Pembangunan Berkelanjutan. (2012). Masa Depan yang Kita Inginkan. Rio de Janeiro. Diakses dari www.menlh.go.id pada tanggal 10 Mei 2017.
- Lemos, M. C. and A. Agrawal. (2006). *Environmental Governance*. Annu. Rev. Environ. Resour. Volume No. 31. Pg: 297 – 325.
- Lomborg, B. (2002). *The Skeptical Environmentalist: Measuring the Real State of The World*. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-01068-9.
- Mahat, H. and S. Idrus. (2016). Education For Sustainable Development In Malaysia: A Study Of Teacher And Student Awareness. *Malaysia Journal of Society and Space* Volume No. 12 Issue (6). Pg: 77 – 88.
- Marshall, G. R., D. W. Hine, and M. J. East. (2017). Can community-based governance strengthen citizenship in support of

- climate change adaptation? Testing insights from Self-Determination Theory. *Environmental Science and Policy*, Vol. 72. Pg. 1 – 9.
- Phimphanthavong, H. (2013). The impacts of economic growth on environmental conditions in Laos. *Int. J. Buss. Mgt. Eco. Res.*, Vol. 4 Issue No. 5. Pg. 766 – 774.
- Population Reference Bureau. (2014). *World Population Rate and Trend*. Diakses dari laman <http://www.prb.org> pada tanggal 25 April 2017.
- Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK). (2015). *Sebaran Sekolah di Indonesia Jenjang SD, SMP dan SMA*. Diakses dari laman www.kemdikbud.go.id pada tanggal 10 Mei 2017.
- Sachs, J. D. (2015). *The Age of Sustainable Development*. Columbia University Press. ISBN 978-0-231-17314-8.
- Shephard, K. (2008). Higher Education For Sustainability: Seeking Affective Learning Outcomes. *International Journal of Sustainability in Higher Education* Volume No. 9 Issue (1). Pg: 87 – 98.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Dasar (SD) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Provinsi Tahun Ajaran 2011/2012-2014/2015

Provinsi	Sekolah				Guru				Murid			
	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015
Aceh	3 339	3 382	3 382	3 392	44 001	44 523	41 743	49 439	546 790	504 349	497 762	484 913
Sumatera Utara	9 343	9 485	9 485	9 490	92 557	94 799	94 162	112 319	1 848 532	1 782 540	1 769 786	1 790 466
Sumatera Barat	4 131	4 097	4 097	4 115	39 250	38 530	41 500	46 681	688 840	666 601	659 530	657 150
Riau	3 394	3 489	3 489	3 568	40 054	45 464	43 918	50 998	735 413	718 513	711 522	794 825
Jambi	2 363	2 396	2 396	2 414	22 446	23 065	24 210	27 942	421 888	404 488	399 998	398 456
Sumatera Selatan	4 539	4 634	4 634	4 609	54 417	55 339	50 077	60 671	958 005	914 640	907 119	941 957
Bengkulu	1 329	1 340	1 340	1 351	13 847	14 934	13 608	16 010	243 589	234 392	229 879	221 130
lampung	4 539	4 649	4 649	4 606	53 601	52 843	50 464	57 319	1 017 863	986 569	973 090	846 315
Kepulauan Bangka Belitung	777	781	781	789	8 322	8 304	7 986	9 002	147 642	148 975	147 735	158 230
Kepulauan Riau	838	872	872	880	9 358	10 249	10 671	12 746	170 794	171 920	172 512	214 003
DKI Jakarta	3 112	3 060	3 060	2 770	34 514	43 120	41 017	41 285	837 875	827 451	822 717	838 426

Jawa Barat	19 874	19 981	19 981	19 817	189 303	207 476	209 033	227 876	4 789	4 996	4 719	4 611
Jawa Tengah	19 331	19 362	19 362	19 144	161 153	185 119	195 140	207 892	3 383	3 235	3 201	2 941
DI Yogyakarta	1 907	1 846	1 846	1 848	18 664	23 154	25 048	22 839	305 157	294 708	292 164	289 832
Jawa Timur	19 701	19 742	19 742	19 428	198 245	215 462	216 836	223 416	3 304	3 137	3 104	2 963
Banten	4 501	4 593	4 593	4 523	51 235	53 707	53 787	59 811	1 274	1 212	1 192	1 211
Bali	2 411	2 430	2 430	2 434	22 511	27 237	24 209	26 684	421 665	410 912	407 794	410 396
Nusa Tenggara Barat	3 058	3 115	3 115	3 139	30 468	34 825	34 807	40 590	559 926	540 114	533 206	518 881
Nusa Tenggara Timur	4 721	4 820	4 820	4 921	37 597	42 886	41 500	53 923	796 149	794 108	790 684	831 899
Kalimantan Barat	4 141	4 217	4 217	4 308	28 172	32 525	34 342	40 644	655 931	626 994	617 491	616 996
Kalimantan Tengah	2 471	2 539	2 539	2 590	20 962	22 157	20 208	25 144	328 432	310 087	304 919	295 945
Kalimantan Selatan	2 869	2 900	2 900	2 899	28 805	38 198	38 274	31 047	421 022	400 444	392 538	386 557
Kalimantan Timur	2 221	2 257	2 257	1 826	26 209	27 653	26 438	25 392	437 285	432 878	429 811	409 120
Kalimantan Utara ¹				451				5 641				77 694
Sulawesi Utara	2 205	2 221	2 221	2 214	16 936	16 405	25 890	19 406	280 172	277 967	274 583	269 015
Sulawesi Tengah	2 729	2 811	2 811	2 835	21 924	23 957	22 630	28 025	361 561	355 759	353 334	375 072

Sulawesi Selatan	6 283	6 332	6 332	6 348	58 974	70 447	64 475	73 530	1 041 568	1 034 420	1 026 655	997 473
Sulawesi Tenggara	2 262	2 279	2 279	2 268	21 772	21 526	21 317	24 455	348 700	341 560	339 666	342 647
Gorontalo	900	915	915	928	8 085	8 184	8 144	8 852	166 675	161 010	158 170	138 523
Sulawesi Barat	1 287	1 314	1 314	1 306	10 179	11 340	9 955	13 098	180 271	177 813	175 588	173 941
Maluku	1 713	1 739	1 739	1 731	15 293	16 759	17 626	17 768	272 028	268 525	265 851	235 170
Maluku Utara	1 249	1 268	1 268	1 272	7 652	8 099	7 559	10 771	173 173	179 329	178 636	166 128
Papua Barat	972	975	975	976	4 384	4 148	8 913	7 254	122 119	118 911	117 529	131 129
Papua	2 316	2 431	2 431	2 323	10 691	11 557	13 932	16 889	333 478	34 084	336 644	391 123
Indonesia	146 826	148 272	148 272	147 513	401 581	533 991	539 819	695 349	583 919	27 680	26 160	26 141

Catatan: ¹ Data 2012/2013 - 2013/2014 masih bergabung dengan Provinsi Kalimantan Timur

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Data dikutip dari publikasi Statistik Indonesia

Lampiran 2. Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Provinsi Tahun Ajaran 2011/2012-2014/2015

Provinsi	Sekolah				Guru				Murid			
	201 1/2 012	2012/ 2013	2013/ 2014	2014/ 2015	2011/ 2012	2012/ 2013	2013/ 2014	2014/ 2015	2011/ 2012	201 2/2 013	201 3/2 014	201 4/2 015
Aceh	930	973	977	1 021	16 882	17 766	19 205	24 355	201 740	204 581	199 732	201 489

Sumatera Utara	2 258	2 354	2 374	2 392	34 062	40 079	39 457	51 925	626 521	640 894	641 214	649 018
Sumatera Barat	742	743	747	762	15 508	16 614	16 843	20 678	207 553	207 521	208 412	210 687
Riau	946	964	973	1 061	12 994	14 792	15 909	20 256	224 331	230 202	231 450	242 407
Jambi	598	609	613	628	7 157	8 950	9 376	11 549	120 312	120 360	120 452	121 401
Sumatera Selatan	1 161	1 204	1 215	1 239	17 824	20 003	21 791	28 412	323 034	323 921	334 093	341 351
Bengkulu	386	398	401	413	5 491	6 235	6 078	7 735	85 632	83 080	83 456	86 453
lampung	1 215	1 266	1 255	1 274	17 668	20 164	22 001	27 751	312 784	316 934	317 452	318 545
Kepulauan Bangka Belitung	189	191	188	196	2 529	2 614	2 605	3 296	46 429	53 372	53 498	54 080
Kepulauan Riau	268	281	287	296	3 023	3 550	3 997	4 984	59 871	64 462	66 409	74 457
DKI Jakarta	943	1 066	1 060	1 066	16 777	20 268	18 202	23 899	343 594	365 419	365 612	379 008
Jawa Barat	4 106	4 455	4 350	4 616	57 806	69 664	79 675	105 863	1 655 657	1 741 465	1 742 142	1 771 321
Jawa Tengah	3 182	3 305	3 197	3 200	58 516	64 387	72 415	82 858	1 203 429	1 217 916	1 218 243	1 219 304
DI Yogyakarta	477	435	431	434	9 246	9 779	9 732	11 068	124 716	129 468	129 578	129 809
Jawa Timur	4 080	4 312	4 271	4 376	68 151	73 442	81 301	99 145	1 214 436	1 231 392	1 243 194	1 259 024
Banten	1 166	1 289	1 283	1 317	14 341	18 177	18 593	26 237	388 888	414 934	415 616	426 848

Simanjuntak, Pendidikan Untuk Pembangunan Berkelanjutan

Bali	397	398	391	395	9 925	10 586	10 563	13 514	177 462	187 482	189 060	193 916
Nusa Tenggara Barat	700	825	828	826	9 020	10 685	14 270	19 623	175 637	178 986	177 179	178 236
Nusa Tenggara Timur	1 193	1 368	1 408	1 472	10 687	14 224	18 050	23 896	263 454	264 929	284 327	301 796
Kalimantan Barat	1 078	1 122	1 167	1 206	7 643	11 028	11 662	16 265	195 281	201 649	202 346	215 866
Kalimantan Tengah	673	727	727	766	6 242	7 752	7 600	9 715	87 126	87 579	95 355	100 266
Kalimantan Selatan	572	600	567	576	7 997	8 398	8 841	10 314	105 710	108 739	110 132	117 116
Kalimantan Timur	707	688	708	583	8 851	9 882	9 996	10 350	157 198	156 147	165 267	147 326
Kalimantan Utara ¹	-	-	-	152	-	-	-	2 304	-	-	-	28 590
Sulawesi Utara	670	677	683	691	7 473	8 780	7 674	10 549	111 023	111 030	112 987	116 680
Sulawesi Tengah	699	778	765	788	6 260	6 813	8 867	11 479	116 474	113 170	120 443	124 396
Sulawesi Selatan	1 418	1 565	1 542	1 585	21 728	23 521	27 892	34 873	379 772	384 944	381 949	389 984
Sulawesi Tenggara	643	678	679	685	7 375	9 051	9 718	11 631	119 255	119 513	121 125	122 220
Gorontalo	304	318	318	318	3 214	3 817	3 841	4 439	44 731	45 892	46 628	48 334
Sulawesi Barat	285	315	319	320	2 836	3 683	3 615	5 099	58 011	55 684	57 484	58 733
Maluku	546	551	575	591	5 652	6 837	5 730	8 631	90 769	82 901	89 401	94 389

Maluku Utara	393	402	407	437	2 808	3 284	3 576	5 441	59 818	55 683	56 541	57 319
Papua Barat	221	213	230	258	1 947	2 171	2 621	3 476	39 864	41 121	39 529	41 766
Papua	522	457	552	578	4 631	5 087	4 393	7 832	104 824	111 723	94 897	108 512
Indonesia	33	35	35	36	482	552	596	759	9	9	9	9
	668	527	488	518	264	083	089	442	425	653	715	930
									336	093	203	647

Catatan: ¹ Data 2012/2013 - 2013/2014 masih bergabung dengan Provinsi Kalimantan Timur

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Data dikutip dari publikasi Statistik Indonesia

Lampiran 3. Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Atas (SMA) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Provinsi Tahun Ajaran 2011/2012-2014/2015

Provinsi	Sekolah				Guru				Murid			
	2011/ 2012	2012/ 2013	2013/ 2014	2014/ 2015	2011/ 2012	2012/ 2013	2013/ 2014	2014/ 2015	201 1/2 012	201 2/2 013	201 3/2 014	201 4/2 015
Aceh	455	460	458	481	10 807	10 802	10 743	14 685	155 268	157 995	154 135	136 543
Sumatera Utara	981	987	938	1 007	20 539	20 533	15 696	27 055	344 301	346 919	344 754	332 243
Sumatera Barat	266	289	283	296	9 658	9 635	10 103	12 446	128 789	132 449	131 698	136 468
Riau	327	391	365	400	7 876	7 812	8 191	11 083	115 547	118 171	119 252	134 974
Jambi	203	210	201	209	4 177	4 170	4 210	5 790	66 681	70 757	67 737	68 521
Sumatera Selatan	532	554	474	570	10 733	10 711	13 162	17 369	191 407	200 078	202 054	190 991
Bengkulu	122	128	123	129	3 083	3 077	2 350	4 060	44	45	48	44

Simanjuntak, Pendidikan Untuk Pembangunan Berkelanjutan

									346	962	294	341
lampung	421	447	453	456	8 939	8 913	9 901	12 851	121 345	123 072	126 141	134 904
Kepulaa n Bangka Belitung	66	65	65	66	1 182	1 183	1 390	1 641	20 560	21 107	21 424	21 036
Kepulaa n Riau	101	101	101	109	1 803	1 803	1 839	2 478	28 027	33 621	34 663	33 710
DKI Jakarta	502	469	473	470	12 304	12 337	13 343	13 044	187 656	188 696	183 575	153 900
Jawa Barat	1 342	1 320	1 379	1 415	28 927	28 949	34 079	40 585	566 086	567 233	568 479	551 853
Jawa Tengah	876	851	1 227	855	23 692	23 717	27 683	28 549	400 184	403 375	400 583	364 216
DI Yogyakart a	166	163	163	162	5 065	5 068	4 159	5 089	51 591	53 099	53 125	50 954
Jawa Timur	1 263	1 297	1 331	1 426	28 171	28 137	30 872	40 365	494 472	495 558	493 873	482 309
Banten	463	461	475	488	7 500	7 502	10 382	11 935	148 069	153 169	156 938	155 829
Bali	170	166	164	164	5 320	5 324	6 174	6 621	80 374	80 621	83 810	79 145
Nusa Tenggara Barat	264	279	273	293	5 182	5 167	6 121	9 936	98 556	100 548	99 465	100 642
Nusa Tenggara Timur	314	419	397	435	6 388	6 283	7 634	11 532	119 906	123 043	128 553	155 086
Kalimanta n Barat	336	365	350	366	4 725	4 696	7 553	7 536	93 365	94 892	98 180	103 322
Kalimanta n Tengah	196	216	226	225	3 563	3 543	4 075	4 507	47 903	48 283	47 524	47 731
Kalimanta n Selatan	173	182	177	185	3 373	3 364	4 044	4 716	51 678	54 657	55 579	54 470

Kalimantan Timur	250	261	269	207	4 631	4 620	5 876	4 737	68 693	73 521	73 588	60 295
Kalimantan Utara ¹				54				1 161				13 871
Sulawesi Utara	208	206	226	208	3 853	3 855	2 872	4 363	51 252	51 524	52 199	50 771
Sulawesi Tengah	166	185	175	187	2 936	2 917	3 251	4 469	56 921	57 645	58 062	61 135
Sulawesi Selatan	501	539	547	550	11 296	11 258	16 926	16 854	185 474	188 995	200 021	214 143
Sulawesi Tenggara	227	255	252	265	5 094	5 066	5 395	6 866	76 940	79 787	77 231	80 497
Gorontalo	49	51	56	53	1 268	1 266	1 113	1 537	19 796	20 692	19 625	23 645
Sulawesi Barat	61	73	72	71	1 182	1 170	1 101	1 733	21 709	22 899	22 897	24 290
Maluku	217	241	234	245	4 135	4 111	2 577	5 551	61 205	62 305	62 513	63 452
Maluku Utara	167	164	181	169	1 773	1 776	2 160	3 132	30 168	31 597	34 008	33 868
Papua Barat	99	106	104	105	1 014	1 007	1 233	1 957	22 802	23 842	23 380	22 776
Papua	170	206	197	192	2 669	2 633	2 503	3 947	45 396	46 748	48 928	50 641
Indonesia	11 654	12 107	12 409	12 513	252 858	252 405	278 711	350 180	196 467	272 860	292 288	232 572

Catatan: ¹ Data 2011/2012- 2013/2014 masih bergabung dengan Provinsi Kalimantan Timur

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Data dikutip dari publikasi Statistik Indonesia